

VOC dan Dinamika Kekuasaan di Sumenep Abad XVIII: Sebuah Tinjauan Historis

Syifaul Qalbiyah*, Daya Negri Wijaya
Universitas Negeri Malang, Indonesia
*syifaul.qalbiyah.2107316@students.um.ac.id

Abstract

The city of Sumenep is a traditional palace city which is located on the outskirts of the city and also close to the beach. The Palace City has the function of being the residence of kings and their families, and has a role as a place for cultural activities, government activities and the economy. Since 1705, after Sumenep came under the auspices of the VOC, elements of foreign culture began to enter into the formation of the city of Sumenep. The general aim of this research is to describe incidents or events in the past, and then use them for the learning process in the present. The research method used in this research is the historical research method which consists of five stages, first topic selection, second heuristics, third source criticism, fourth interpretation, and fifth historiography. Sumenep is located at the tip of Madura Island and occupies a strategic position that supports Sumenep as a stopping area which is often visited by ships and boats from the archipelago or from abroad. In 1705, when Mataram entered into an agreement, Sumenep as a whole became colonial territory and Sumenep was a busy trade center in the 18th century because it had a port as a stopping area for ships connecting with islands in the eastern region and had an important port for trade over long distances. Thus, the release of the Sumenep area from Mataram's control would certainly go through a long process. One of the influencing factors is the existence of an element of interest in maintaining the power that has mastered this issue.

Keywords: VOC Penetration; Sumenep; Trade Routes

Abstrak

Kota Sumenep adalah kota keraton tradisional yang letaknya berada di wilayah yang subur dan juga dekat dengan pantai. Kota Keraton memiliki fungsi sebagai daerah kediaman para raja beserta para keluarganya, dan memiliki peran sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan kebudayaan, kegiatan pemerintahan, serta perekonomian. Sejak tahun 1705 setelah sumenep dibawah naungan VOC, mulai masuk unsur kebudayaan asing ke dalam pembentukan Kota Sumenep. Tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau peristiwa di masa lalu, dan kemudian digunakan untuk proses pembelajaran di masa kini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahap, pertama pemilihan topik, kedua heuristik, ketiga kritik sumber, keempat interpretasi, dan kelima historiografi. Sumenep terletak di ujung Pulau Madura menempati posisi strategis yang mendukung Sumenep sebagai daerah pemberhentian yang sering disinggahi kapal dan perahu dari nusantara ataupun dari luar negeri. Pada tahun 1705 saat Mataram mengadakan perjanjian, secara keseluruhan Sumenep menjadi wilayah kekuasaan Kolonial dan Sumenep merupakan pusat perdagangan yang ramai pada abad XVIII karena memiliki pelabuhan sebagai daerah pemberhentian kapal-kapal yang menghubungkan dengan pulau yang berada di wilayah timur serta memiliki pelabuhan penting untuk perdagangan dalam jarak jauh. Dengan demikian, lepasnya daerah Sumenep dari kekuasaan Mataram tentu melewati proses yang panjang. Salah satu

faktor yang mempengaruhi yaitu adanya salah satu unsur kepentingan demi menjaga kekuasaan yang telah menguasai dalam permasalahan ini.

Kata Kunci: Penetrasi VOC; Sumenep; Jalur Perdagangan

Pendahuluan

Pemerintahan awal di Pulau Madura bermula dari usaha Raja Singhasari yang bertujuan untuk memperluas wilayah terkenal dengan sebutan cakrawala mandala. Arya Wiraraja dikirim ke daerah Madura bagian Timur atas keinginan dari Raja Kertanegara. Tujuan utama Arya Wiraraja dikirim tugas utamanya tidak hanya melakukan cakrawala mandala melainkan menghilangkan ketakutan raja Kertanegara jika pada periode selanjutnya Arya Wiraraja akan mempengaruhi keturunan dari Narasinghamurti yang memiliki tujuan untuk mengganggu kekuasaannya. Arya Wiraraja memerintah pada tahun 1296-1292 (Zulkarnain et al., 2014). Sultan Agung yang telah melakukan ekspansi guna mengendalikan semua daerah khususnya di Pulau Jawa ikatan diantara wilayah Jawa dan wilayah Madura terikat dengan baik. Mataram pada awal bulan Agustus tahun 1624 seluruh wilayah desa ataupun kota di Pulau Madura telah dikuasainya (De Graaf, 1986). Seluruh penguasa di Pulau Madura gugur pada saat pertempuran, yang selamat hanya Raden Prasena dari pertempuran tersebut, selanjutnya Raden Prasena oleh Sultan Agung dianugerahi gelar yaitu Cakraningrat I dikarenakan Raden Prasena memiliki kemahiran dan sikap yang baik, selain itu Raden Prasena juga dilantik sebagai kepala pemerintahan di seluruh pulau madura, tetapi posisi tersebut memiliki suatu konsekuensi yang harus dipatuhi oleh Raden Prasena untuk memerintah sembari menetap di istana Mataram (Rahayu, 2016).

Cakraningrat I ketika tidak berada di Madura menimbulkan rasa khawatir dari golongan masyarakat madura, faktor utamanya yaitu di Madura seluruh bentuk pemerintahan yang diterapkan hanya di atas namakan Cakraningrat I sedangkan bentuk sistem pemerintahannya yang menjalankan adalah keluarga kerajaan, sedangkan kepemimpinan ayahnya yang bernama Amangkurat I berusaha untuk dijatuhkan oleh adipati anom. Hubungan antara Amangkurat I dan putra mahkotanya, adipati anom, mulai memburuk akibat sebuah kejadian penting. Insiden yang memicu perselisihan ini adalah terbunuhnya pangeran pekik. Terpilihnya sebagai perwakilan dari rakyat Madura bentuk kerjasama diantara Adipati Anom dan Trunajaya dari berbagai kalangan telah mendapatkan bantuan, salah satunya yaitu dari masyarakat Makassar dimana keinginan dari masyarakat Makassar tidak disetujui oleh raja untuk meminta tanah kemudian masyarakat Makassar tidak senang terhadap amangkurat I. Amangkurat I telah dipandang oleh Sunan Giri dan Sultan Agung Tirtayasa bahwasanya telah bergabung dengan orang kafir (Santoso, 2016).

Trunajaya, anak Demang Malaya, pernah bermukim di Mataram bersama ayahnya. Selama tinggal di sana, ia menyaksikan berbagai bentuk kolaborasi dan penyelewengan yang berlangsung di lingkungan istana (Santoso, 2016). Pihak Mataram sangat susah untuk mengalahkan perlawanan yang dipimpin oleh trunajaya, kemudian cara yang dilakukan oleh Mataram yaitu menuntut kepada VOC untuk meminta bantuan tepatnya pada tanggal 28 Juni tahun 1677 setelah Istana Plered dikuasai oleh Trunajaya (Kasdi, 2003). Trunajaya menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin berpengaruh. Ia berhasil mengarahkan, menyusun, dan mengendalikan pasukan besar dengan efektif. Dalam tempo yang begitu singkat, pasukannya mampu menguasai istana Mataram di Plered, yang merupakan lambang kebesaran kerajaan tersebut (Romli, 2023). Hubungan di antara VOC dan Mataram menjadi semakin dekat setelah Trunajaya memegang penuh atas kekuasaan Istana Plered dan adanya peristiwa Amangkurat I yang

meninggal dunia. Dengan cara yang dilakukan oleh Adipati Anom untuk mengkhianati Trunajaya yaitu meminta pihak VOC melakukan bantuan yang bertujuan untuk mengalahkan adanya bentuk dari perlawanan yang dilakukan oleh Trunajaya. VOC dimintai bantuan oleh Adipati Anom yang berusaha untuk memfitnah Trunajaya guna mengalahkan perlawanan yang dipimpin oleh Trunajaya (Rahayu, 2016). Telah diangkat menjadi penguasa wilayah Sumenep karena kemenangan yang diperoleh Trunajaya yaitu Macan Wuhung yang memiliki gelar Yudanegara (Kasdi, 2003). Secara tidak langsung dari adanya pengangkatan Tumenggung Yudanegara sebagai penguasa wilayah Sumenep menyebabkan wilayah Sumenep menjadi bentuk pertahanan dari Trunajaya. Salah satu bentuk dari Amangkurat I dan VOC untuk mengalahkan Trunajaya yaitu terus melancarkan bentuk serangan yang dibuatnya dengan cara yang cukup licik menggunakan sebilah keris di perkemahan yang membuat Trunajaya berhasil dikalahkan (Rahayu, 2016).

Kabar wafatnya Trunajaya didengar oleh Yudanegara kemudian Yudanegara berkhianat dan memandang nasib kedepannya akan jauh lebih baik jika Yudanegara memilih VOC untuk dijadikan bentuk pertahanannya, selain adanya hal tersebut keinginan dari Yudanegara yaitu Sumenep ingin dijadikan bagian dari vasal VOC, tetapi sebelum hal itu terjadi Yudanegara wafat tahun 1684 (Kasdi, 2003). Adanya upeti yang tergolong tinggi telah diberikan oleh pihak Mataram kepada Sumenep membuat Sumenep berambisi untuk melepaskan diri dari bentuk dominasi Mataram. Sumenep menduduki posisi kedua setara dengan Surabaya pada permasalahan pembayaran pajak tetapi posisi Pekalongan masih di atas Sumenep dan Surabaya (Kasdi, 2003). Surat perjanjian pada tanggal 5 Oktober tahun 1705 yang telah disahkan menjadikan Sumenep sebagai wilayah kekuasaan VOC yang diharapkan oleh Yudanegara, hal tersebut baru terjadi pada penggantinya (Rahayu, 2016). Sumenep dijadikan contoh untuk menarik perhatian wilayah lain agar wilayah lain mau menjadi bagian dari VOC. Letak wilayah Sumenep yang dapat dikatakan strategis dalam hal pengamanan jalur pelayaran khususnya ke wilayah Maluku memiliki potensi yang bagus, adanya hal tersebut membuat VOC menjadi tertarik untuk tetap menguasai daerah Sumenep (Kasdi, 2003). Penetrasi VOC di Sumenep pada abad XVIII dapat dilihat melalui hubungan dagang, pemerintahan, dan kekuatan militer. Keberhasilan VOC dalam menjalin kemitraan dengan penguasa setempat atau menggantikan mereka dengan penguasa yang lebih kooperatif menjadi faktor utama dalam menentukan pengaruh mereka khususnya di wilayah tersebut. Adanya perkembangan ini membentuk landasan bagi eksploitasi sumber daya dan penjagaan pada jalur perdagangan yang menjadi kekuatan bagi VOC sebagai perusahaan Kolonial.

Perjanjian yang telah dilaksanakan oleh Pakubuwono I bersama VOC mengakibatkan wilayah Sumenep lepas ke tangan VOC. Adapun hasil dari perjanjian yang telah disepakati yaitu sebagian dari wilayah Mataram harus dilepaskan dikarenakan Mataram tidak bisa melunaskan hutang dari ganti rugi perang (Rahayu, 2016). Penetrasi VOC di Sumenep pada abad XVIII mencerminkan periode sejarah yang kaya dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik di nusantara. Sumenep, yang merupakan bagian dari Pulau Madura, menjadi salah satu fokus utama VOC dalam upaya ekspansi dan pengendalian sumber daya alam di kepulauan tersebut. Pada abad XVIII, VOC mengalami masa-masa transisi dan perubahan, meskipun masih menjadi perusahaan dagang utama dalam perdagangan rempah-rempah, VOC juga terlibat dalam kebijakan politik dan pemerintahan di wilayah-wilayah dimana mereka beroperasi. Sumenep, sebagai pusat kerajaan yang kuat khususnya di pulau madura, menjadi titik fokus dalam strategi VOC untuk mengamankan jalur perdagangan penting dan mengendalikan sumber daya alam yang sangat melimpah. Faktor yang mendukung Sumenep menjadi pusat perdagangan yaitu dikarenakan Sumenep memiliki pelabuhan yang bernama Pelabuhan

Kertasada memiliki fungsi yaitu bandar kapal yang berlayar ke seluruh Nusantara (De Jonge, 2011). Penelitian ini berupaya mengkaji kembali tentang sistem perdagangan VOC pada abad XVIII. Ketersediaan berbagai sumber sejarah tentunya sangat mendukung keberlangsungan penelitian saat ini.

Letak posisi Sumenep di penghujung timur dari pulau Madura, mempunyai peranan sangat penting dalam sejarah perdagangan di Hindia Belanda abad XVIII. Pelabuhan Kertasada merupakan pusat perdagangan utama menjadi saksi bisu perkembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas perdagangan pada masa itu. Faktor-faktor seperti lokasi geografis yang sangat strategis dalam jaringan perdagangan, sarana fisik yang dibangun di Kalianget juga sudah memadai, dan jaringan-jaringan perdagangannya yang luas membuat Sumenep menjadi pusat dalam sistem perdagangan pada masa kolonial. Kelangkaan studi historis mengenai Sumenep, terutama yang berfokus pada era penjajahan Kolonial, telah memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dan analisis mendalam. Fokus penelitian ini adalah mengkaji proses masuk dan berkembangnya pengaruh VOC di wilayah Sumenep selama abad XVIII. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 1) Mengetahui geopolitik dan Sumenep sebelum kedatangan VOC, 2) Mengetahui kehadiran VOC di Sumenep, dan 3) Mengetahui perdagangan VOC di Sumenep pada abad XVIII. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan rinci mengenai jaringan perdagangan di Sumenep selama abad XVIII yang mana menjadi tonggak penting dalam sejarah perdagangan global.

Metode

Metode penelitian mengenai VOC dan Dinamika Kekuasaan di Sumenep pada Abad XVIII: Sebuah Tinjauan Historis menggunakan metode penelitian sejarah (*historical approach*), yang terdiri dari lima langkah berurutan, yaitu pertama pemilihan topik, kedua heuristik, ketiga kritik sumber, keempat interpretasi, dan kelima historiografi. Langkah pertama pada pemilihan topik dilakukan dengan cara menganalisis adanya sebuah potensi permasalahan dan adanya keterbaruan riset yang akan dikaji, hal yang mendasari peneliti mengkaji topik ini karena peneliti memiliki keterkaitan terhadap sejarah VOC di Sumenep. Langkah kedua yaitu heuristik. Pada langkah ini sumber data yang peneliti gunakan berasal dari berbagai sumber sejarah baik dari sumber Belanda ataupun sumber lokal yang memiliki kaitan dengan jejak VOC di Sumenep. Penelitian ini adalah hasil studi literatur yang berkaitan dengan fakta-fakta yang didapatkan dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, dan internet. Langkah ketiga yaitu kritik dan sumber. Dalam penelitian ini, kritik sumber terbagi menjadi dua kategori utama kritik eksternal dan kritik internal. Adanya pelaksanaan kritik *ekstern* berfungsi guna mengukur sumber-sumber sesuai dengan zamannya. Kritik *intern* dilaksanakan untuk menilai isi dari sumber tersebut masih berkaitan dari masalah yang diteliti atau tidak. Langkah keempat dalam proses penelitian melibatkan tahap penafsiran. Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan memberi makna terhadap berbagai jenis data yang telah dikumpulkan, serta mengidentifikasi hubungan antara data-data tersebut. Selanjutnya, peneliti menghubungkan informasi dari berbagai sumber data baik primer maupun sekunder, untuk menyusun rangkaian peristiwa atau fakta yang saling terkait. Langkah terakhir yaitu historiografi. Setelah melakukan penafsiran, peneliti menyajikan temuannya dalam bentuk narasi sejarah. Tulisan ini disusun dengan memperhatikan aspek logika, sistematika, dan urutan kronologis peristiwa. Penyusunan narasi ini mengikuti kerangka yang telah ditetapkan dalam rencana penelitian, mencerminkan hasil analisis dari berbagai sumber data yang telah dikaji khususnya pada pembahasan VOC di Sumenep.

Hasil dan Pembahasan

1. Geopolitik dan Sumenep Sebelum Kedatangan VOC

Pulau Madura secara geografis memiliki letak di sebelah timur laut dari Pulau Jawa, sekitar 7° selatan garis khatulistiwa, diantara 112° dan 114° bujur timur. Panjang pulau ini 160 km dan memiliki lebar pulau yaitu 40 km, dengan total 5.304 km² luas keseluruhan. Meski secara geografis Madura adalah pulau yang cukup besar, kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budayanya masih erat terkait dengan pulau Jawa. Letak Sumenep dipenghujung timur Pulau Madura, antara 113° 32' 54" - 116° 16' 48" Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan (Kasdi, 2003). Wilayah ini berdampingan dengan laut Jawa di bagian utara, selat Madura di bagian selatan, laut Jawa di bagian timur, dan pamekasan di bagian barat. Letak geografis yang strategis ini menjadikan Sumenep sebagai tempat persinggahan sementara bagi perahu dan kapal dari negara lain atau daerah lain di Nusantara. Posisinya yang strategis memungkinkan Sumenep menjadi titik temu berbagai jalur pelayaran, menghubungkan berbagai wilayah di kepulauan Nusantara.



Gambar 1. *Kaart van Java en Madoera, rechterdeel*, Adriaan Jan Bogaerts, 1850
(Sumber: Rijkmuseum, 1850)

Sebelum kedatangan Belanda, Sumenep salah satu kota keraton, terletak di kawasan yang sangat makmur karena memiliki letak tatanan kota yang strategis dan berdampingan dengan pantai sebagai tempat perdagangan. Kota keraton ini adalah tempat tinggal pemimpin Sumenep, keluarga kerajaan, selir, seluruh bangsawan, dan pegawai istana. Lebih dari sekadar tempat tinggal, kota keraton berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan sistem pemerintahan di kerajaan Madura (Mahmudah, 2018). Di luar keraton, terdapat kampung-kampung yang kehidupan masyarakatnya, baik langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi oleh istana. Pemukiman masyarakat timur contohnya seperti masyarakat Cina, masyarakat Arab, dan masyarakat Melayu terpisah dengan ketua kelompok masing-masing. Selain itu, kota keraton dikelilingi oleh desa-desa yang masih menjadi bagian integral dari kota tersebut. Keberadaan desa-desa ini menunjukkan bahwa pengaruh dan struktur kota keraton meluas jauh melampaui batas fisiknya (De Jonge, 1989).

Pada masa lampau, sebelum kedatangan Belanda di kepulauan Indonesia, kota-kota kecil telah berkembang di sekitar keraton, tempat tinggal para raja. Kota-kota ini tidak hanya dihuni oleh banyak tenaga kerja dan pembantu istana, tetapi juga dihuni oleh pemilik toko kelontong, pedagang, maupun tukang. Keraton di Madura menjadi pusat ekonomi, kebudayaan, dan pemerintahan kerajaan. Kota keraton memiliki kemiripan dengan konsep *Rentnerstadt*, yaitu tempat di mana peluang ekonomi bagi para tukang dan pedagang sangat bergantung pada pendapatan pajak dari para *Rentainers* (rentenir), yang

terdiri dari raja, bangsawan, dan pejabat istana (Mahmudah, 2018). Di Sumenep, pada tahun 1672, Raden Wangsajaya (Raden Bugar) terpilih menjadi pemimpin pemerintahan. Tidak kembalinya Tumenggung Jaingpati dari Sampang ke Sumenep membuat Raden Wangsajaya diangkat sebagai bupati atas permintaan masyarakat Sumenep dan Raden Trunajaya menyaksikan pengangkatan tersebut. Sumenep pada tahun 1700 memiliki dua bupati yang memimpin pemerintahan bernama Tumenggung Pulangjiwa dan Pangeran Seppo. Di tahun 1702 Pangeran Rama yang bergelar Cakranegara II berhasil mempersatukan pemerintahan sumenep, dan selanjutnya tahun 1705 Tumenggung Wiramenggala putra Pangeran Seppo menjadi pemegang pemerintahan Sumenep (Zulkarnain et al., 2014).

Pangeran Jimat yang dikenal sebagai Cakranegara III memimpin dua daerah, ia berkuasa tahun 1705 yaitu di daerah Sumenep dan daerah pamekasan. Pangeran Jimat, yang bernama kecil Raden Achmad, adalah putra Pangeran Rama. Awalnya menjabat sebagai bupati Pamekasan, ia kemudian ditunjuk VOC untuk memimpin Sumenep setelah ayahnya meninggal. Pangeran Jimat memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan daerah Besuki dan blambangan. Setelah itu, ia memindahkan penduduk ke wilayah baru yang dibukanya di Pamekasan (Zulkarnain et al., 2014). Dominasi VOC atas sumenep didukung oleh situasi internal yang rumit di Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Setelah pertempuran sengit pada tahun 1624, Mataram berhasil menaklukkan madura. Adanya bentuk dominasi Mataram membuat Trunajaya tidak tinggal diam, ia memimpin rakyat Madura untuk melakukan gerakan pemberontakan tepatnya pada tahun 1670, selain itu segala bentuk upaya untuk mengusir Mataram telah dilakukan oleh seluruh masyarakat sumenep. Perjuangan ini menunjukkan tekad mereka untuk membebaskan diri dari kekuasaan asing (Zulkarnain et al., 2014).

VOC memanfaatkan situasi genting ini dengan menawarkan bantuan, namun dengan syarat-syarat yang jelas menguntungkan mereka sendiri. Dalam keadaan terdesak selama peperangan, raja Mataram tidak memiliki pilihan lain selain menerima persyaratan yang diajukan VOC melalui beberapa kontrak. Akibat perjanjian ini, VOC memperoleh banyak hak istimewa. Hal ini mengakibatkan Mataram kehilangan peran pentingnya, terutama pada saat melakukan perdagangan internasional di wilayah pantai bagian utara. Pada awalnya VOC tidak memperoleh keuntungan dari adanya kesepakatan terkait madura, mataram tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap pulau ini. Namun, tahun 1680 setelah terjadinya suatu pergolakan, daerah pamekasan dan sumenep tidak pasrah begitu saja, melainkan tetap berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan raja mataram. Upaya ini menunjukkan keinginan kuat mereka untuk mendapatkan otonomi dari kekuasaan yang telah lama mendominasi (Zulkarnain et al., 2014).

Penguasa wilayah madura timur yang berpusat di sumenep, macan wuhung yang diangkat oleh Trunajaya dan diberi gelar Yudanegara, tatkala tuannya dalam keadaan terdesak di kediri, dengan tajam mampu melihat keberuntungan tidak pada tuannya, berbalik menyatukan kesetiaan dan meminta perlindungan kepada VOC. Lebih dari itu penguasa sumenep tersebut juga melepaskan diri dari kekuasaan mataram (De Jonge, 1989). Tentunya kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh VOC, dalam waktu selanjutnya perlakuan terhadap sumenep dan Pamekasan oleh VOC dijadikan model dalam menghadapi daerah-daerah lain agar mau bergabung dengan pihak belanda. Dengan keuntungan yang diperoleh dari kompensasi keterlibatan VOC dalam penindasan terhadap Trunajaya berupa monopoli beras, tekstil, dan pengelolaan secara gadai pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara jawa. Penguasaan madura timur memang perlu bagi VOC guna mengamankan jalur pelayarannya ke maluku. Berdasarkan perjanjian Mataram dengan VOC pada tahun 1705, secara resmi daerah sumenep dan pamekasan

oleh Pakubuwana I diserahkan kepada VOC sebagai imbalan bantuan yang diterimanya. Semenjak itu, istilah Madura hanya digunakan bagi daerah bagian barat wilayah pulau itu dengan pusatnya di Bangkalan (De Jonge, 1989).

2. Kehadiran VOC di Sumenep

Awal mula kehadiran VOC di Madura bermula dari konflik antara trunojoyo, keturunan adipati madura, dengan penguasa mataram pada tahun 1670. Trunojoyo, yang ingin membebaskan Madura dari kekuasaan Mataram, berupaya membujuk VOC untuk membantu sumenep dan pamekasan. VOC memanfaatkan pertikaian ini sebagai alat untuk mengurangi dominasi mataram di Jawa. Akibatnya, dengan bantuan VOC kepada trunojoyo, Mataram kehilangan kekuasaannya di pantai utara Jawa (Widyanti & Setiyonugroho, 2022). Meski dianggap kurang subur untuk pertanian, Madura memiliki potensi besar sebagai penghasil garam. Tambak-tambak garam tersebar di sepanjang pantainya. Buku berjudul *Garam, Kekerasan Dan Aduan Sapi* karangan De Jonge (1875) mencatat bahwa hubungan VOC dan Adipati Sumenep ditandai dengan pengiriman upeti berupa hasil bumi ke batavia. Sumenep merupakan penghasil garam utama yang berada di ujung timur madura (Widyanti & Setiyonugroho, 2022). Nama sumenep berasal dari songenep. Masyarakat desa menyebutnya songenep, sementara penduduk kota familiar dengan penyebutan sumenep. Pemakaian huruf O dianggap efektif sesuai dengan penggunaan bahasa madura (Zulkarnain et al., 2014). Namun, pada abad XVIII, bangsa belanda mengubah songenep menjadi sumenep (Atikurrahman, 2008).

Belanda pada abad XVIII telah menjalankan tiga kali terkait pembaruan kesepakatan dengan sumenep, dimana pada awalnya sumenep memiliki status sebagai pemerintahan otonom yang diberikan oleh Belanda dan pada saat tahun 1705 Kolonial Belanda secara sah menjadi pemegang kekuasaan atas wilayah Sumenep serta Belanda akan terus memantau aktivitas yang berada di wilayah tersebut agar VOC lancar dalam melakukan aktivitas perdagangan (Rahayu, 2016). Pada saat Pakubuwono I melepaskan Sumenep, pihak Kolonial semakin gencar memperkuat cengkeramannya di wilayah jajahannya. Pada tahun 1705 wilayah Madura sebagian besar diserahkan kepada VOC oleh mataram. Ketika pakubuwana II memerintah dari tahun 1726 hingga 1749, terjadi peningkatan konflik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan wilayah madura. Hal ini disebabkan oleh keinginan Cakraningrat IV untuk memisahkan diri dari kekuasaan kerajaan mataram. Bahkan, Cakraningrat IV berupaya meminta VOC yang berpusat di batavia, untuk menjadikan madura sebagai wilayah bawahannya. Sejak kejadian tersebut, hubungan antara mataram dan madura semakin memburuk. Cakraningrat IV dibuang ke wilayah tanjung harapan. Di tempat pembuangan inilah ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1759. Masyarakat Madura kemudian mengenangnya dengan julukan Pangeran Sidengkap (Hernawan, 2016). Sementara itu, Pakubuwana II sendiri menjadi target dari berbagai kelompok yang bersaing memperebutkan pengaruh di wilayah kartasura (Kasdi, 2003). Selanjutnya, pakubuwana II melakukan penyerahan kembali atas sebagian wilayah Madura kepada Belanda tahun 1743. Akibatnya, seluruh Pulau Madura berada di bawah kendali penuh pihak belanda. Peristiwa-peristiwa ini menggambarkan bagaimana kekuasaan madura, khususnya sumenep, beralih dari tangan kerajaan mataram ke penjajah belanda melalui serangkaian perjanjian dan penyerahan wilayah (Ricklefs, 2011).

Disebutkan juga dalam Babad Songenep terdapat penjelasan tentang kedatangan pasukan Inggris yang kemudian menyerang sumenep dan mengembalikan seluruh pulau madura termasuk sumenep ke pihak Belanda tahun 1743 yang tercatat dalam Babad Songenep salah satunya *Katjareta'a e settong are bada kapal alabbu e Tandjung. Sakedja' aggi' sardaduna pada toron ka dara' asekap sanapan* yang dapat dialih

bahasakan atau diartikan menjadi Kedatangan pasukan Inggris yang sedang berlabuh di tanjung, sementara serdadunya telah turun dari kapal membawa senapan. Ketika menerima berita seperti itu Panembahan Somala menyuruh Patih Kyai Angabei untuk mendatangi Pasukan Inggris dan bertanya apa maksud kedatangannya. Setibanya di Kalianget, beliau bertemu dengan serdadu Inggris kemudian Patih Kyai Angabei langsung merampok serdadu Inggris hingga banyak yang mati dan luka-luka. Namun serdadu Inggris masih belum melakukan perlawanan, karena mereka mengira bahwa orang sumenep akan takut. Sumenep yang terus menyerang maka serdadu Inggris melawan hingga laskar Sumenep banyak yang mati terkena senapan. Dalam peristiwa tersebut, Kyai Mangon terluka sehingga mundur terarur. Sampai di Loji beliau wafat dan jenazahnya dimakamkan di Asta Tinggi. Setelah Kyai Mangon meninggal dunia, serdadu Inggris pulang dan Pulau Madura dikembalikan lagi kepada Ratu Belanda pada tahun 1743 (Werdisastra, 1996). Penjelasan tersebut juga tercatat didalam Babad Songennep yaitu *Panamba'an Somala adabu ka papatena, anjama Kjae Angabei Mangonadiredja, dabuna Pate, kassa' ba'na sateja kaja entar abareng tre-mantre, anjata'agi apa parlona!. Sanapa'na ka Kalianget pas tatemmo bi' oreng Inggris. Ke Pate sabalana ta' anja-tanja pole pas arampok oreng Inggris, kongse bannja' se loka ban mate, anangeng oreng Inggris gi' ta' alaban onggu, sabab asangka oreng Songennep ladju tako'a marga la bannja' loka se ekenneng sanapan. Ta' abit Ke Mangon pas loka, daddi njorot laonan. Napa' ka lodji pas sida, esareagi e Asta Tinggi. Sasedana Pate Mangon, oreng Inggris pada mole, ta' abit pole Madura e baliagi pole ka Radja Balanda taon 1743* (Werdisastra, 1996).

Berdasarkan sumber arsip dari surat kabar *De Locomotief* yang membahas tentang *de eekste pakoe boewono*, di dalamnya berisi tentang keputusan lepasnya wilayah Sumenep dari kekuasaan Mataram yang tercantum dalam *Bijlagen van Tractaat 5 Oktober 1705*. Isi dalam perjanjian tersebut adalah bagian dari serangkaian kesepakatan antara VOC dan penguasa mataram. Pakubuwono I menyetujui perjanjian ini setelah berhasil merebut tahta mataram dengan bantuan VOC, menggulingkan Amangkurat III. Sebenarnya, kerjasama dengan VOC sudah dimulai pada masa Amangkurat II. leluhur dari Pakubuwono I selalu mencari bantuan dari pihak kompeni dimana adanya cara tersebut kemudian tetap dilanjutkan pada saat Pakubuwono I memerintah. Dalam dokumen *De Opkomst*, pasal 1 menyebutkan bahwa pakubuwono I, melalui perjanjian yang ditandatangani pada 5 Oktober 1705, diharuskan menegaskan kembali adanya hak khusus yang sebelumnya telah diberikan oleh susuhunan mangkurat mas. Hak istimewa ini diberikan kepada Marshall Spellman dan Coope berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat pada dua kesempatan berbeda, yaitu pada 24 September 1646 dan 20 Oktober 1677. Setelah Pakubuwono I resmi menduduki tahta kerajaan dan menyetujui perjanjian yang dimaksud, ia kemudian dianugerahi gelar lengkap Paku Buwana Senapati Ing Ngalanga (De Jonge, 1875).

Dalam perjanjian *Bijlagen Tractaat van 5 October 1705* yang membahas permasalahan Sumenep termasuk bagian wilayah timur madura, atas kehendak Yudanegara yang penjagaan sepenuhnya diberikan kepada Belanda mencakup wilayah pamekasan dan sumenep. Lebih lanjut, dalam perjanjian yang sama, disebutkan bahwa Pakubuwono I wajib melepaskan wilayah pamekasan dan sumenep. Pelepasan ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk kompensasi untuk melunasi hutang Mataram kepada VOC. Dengan kata lain, dalam perjanjian 5 Oktober 1705 ini (Rahayu, 2016) mengemukakan bahwa terdapat dua poin penting pertama, atas kehendak Yudanegara wilayah pamekasan dan sumenep penjagaan sepenuhnya diberikan kepada belanda, dan kedua, pakubuwono I wajib melepaskan kedua wilayah tersebut untuk membayar hutang yang dimiliki mataram terhadap VOC. Isi perjanjiannya sebagai berikut:

Het rijk van Mataram was gevallen, want bij contract van 5 October 1705 werd aan de Compagnie de souvereiniteit afgestaan oviir al de landen bewesten de lijn van den mo.nd der Tjilosnri getrokken tot aan het tegt nwoordige Tjilatjap. Dt' suzereiniteit over het Tjirebonsche rijk werd eveneens aan de Compagnie afgestaan, hetzelfde geschiedde met de lanuen van Soeanenep en Pamekasan op Madoera. Door allerlei opvolgingstwissen viel het eens zoo machtige rijk van Mataram volkomen uiteen, want de hulp en steun der Compagnie beteekenden eveneens uitbreiding v£.n haar grondgebied. Het gezag dar Compagnie en later dat van de N.I. regeering was een waarborg voor de rustige ontwikkeling der gebieden, want de eindelooze oorlogvoering had land en volk in gelijke mate verarmd, waardoor de ontevreden en zich steeds inde oppositie plaatsten. Ter bescherming van den Soesoehoenan Pakoe Boewono I werd in Kartasoera een Hollandsche bezetting achtergelaten ter sterkte van 200 man (De locomotief, 1936). Terjemahannya adalah Kerajaan Mataram telah jatuh, karena berdasarkan kontrak tanggal 5 Oktober 1705, kedaulatan diserahkan kepada kompeni atas seluruh tanah di sebelah barat garis yang ditarik dari muara Sungai Tjilosnri hingga Tjilatjap yang sekarang. Kekuasaan atas kerajaan Tjirebon ini juga diserahkan kepada kompeni, begitu pula jalan Sumenep dan pamekasan di madura. Akibat berbagai macam pertikaian sukses, kerajaan Mataram yang dulunya begitu kuat hancur total, karena bantuan dan dukungan Kompeni juga berarti perluasan wilayahnya. Kewenangan kompeni dan kemudian pemerintahan merupakan jaminan bagi pembangunan yang damai di wilayah tersebut, karena peperangan yang tiada henti telah memiskinkan negara dan masyarakat secara setara, akibatnya pihak yang tidak puas selalu menempatkan diri mereka sebagai oposisi. Untuk melindungi Soesoehoenan Paku Boewono I, sebagian masyarakat Belanda sebanyak 200 orang ditinggalkan di Kartasura.

Salah satu kalimat pada surat perjanjian itu menjelaskan bahwa Pakubuwono I melepas wilayah semarang dan Cirebon. Pamekasan dan Sumenep termasuk dalam daftar wilayah yang terlepas dari kekuasaan mataram. Menariknya, sebelum pelepasan ini, saat pemerintahan tumenggung yudanegara, wilayah Sumenep dan Pamekasan telah memohon secara langsung terhadap VOC agar tidak lagi berada dibawah kekuasaan mataram. Namun, adanya keinginan tersebut belum disetujui oleh VOC. Tragisnya, Tumenggung Yudanegara telah meninggal dunia sebelum permintaan tersebut dijawab. Jadi, meskipun pada akhirnya sumenep dan pamekasan dilepaskan oleh Pakubuwono I melalui perjanjian, sebenarnya kedua wilayah ini sudah lama ingin melepaskan diri dari mataram, bahkan sebelum pelepasan resmi tersebut terjadi (Rahayu, 2016). Sumenep setelah menjadi daerah kekuasaan VOC dapat ditemukan dalam arsip *Oprechte Haerlemsche Courant* tanggal 30 Juli tahun 1746. Informasi ini tercantum pada bagian *Oost Indien*. Pada bagian tersebut menjelaskan bahwa sumenep menjadi daerah kekuasaan Gubernur Sterrenberg dalam menjalankan ekspedisinya, yang kemudian ia menguasai seluruh pulau Madura untuk kepentingan ekspedisi. Namun setelah itu, ia melarikan diri dari Madura dengan cepat dan juga meninggalkan kematian diantaranya adalah putra pangeran madura. Kemudian Gubernur Jenderal Willem Baron van Imhoff menerbitkan manifest secara besar-besaran dan menentang pangeran madura yang memberontak.

De onhtften met noch eenige rebelleerende Volkeren in de Bovenlandêtt'zyn van weynig belang; de lieer Gezaghebber Stcrrenberg x meteenige JO9 Man in Expeditie na Sumanap gemarcheert zynde, nam een Madurcefeß en Baleyersopdie tyding aanftondsde vlugt. irletjagterhiatingvan ioßallenen 3 Stukken Canon daar na is dc Heer Smout met het Battnillon van den Major Barne'walt noch met 2500 Madui eefen llaags geweell, llocg dezelve aanftonds op de vlugt met agterlaatingvan coodooden en veele gequctftxn, onder de laatllf3 bevond zig de Zoon van den Madureefó Prins. De Baron van Imhof, onze

Gouverneur Generaal, enβaadenvan Indie hebben den i6Fe bruary een groot Manifell tegen den rebelleerende Prins van Madura gepubiiceert. Terjemahannya adalah para pengungsi dan masyarakat pemberontak di negeri atas tidak begitu penting, letnan Gubernur Stcrrenberg dalam Ekspedisi berbaris setelah Sumenep, mengambil Madura dan Baleyers pada waktu itu dengan cepat. Setelah itu, ia segera melarikan diri, meninggalkan banyak kematian dan banyak pertanyaan, di antaranya adalah putra pangeran madura. Baron van Imhof, Gubernur Jenderal kita, dan anggota dewan Hindia menerbitkan manifest besar-besaran menentang Pangeran Madura yang pemberontak pada tanggal 16 Februari.

Terdapat hubungan historis antara sumenep dan semarang. Pada pertengahan abad XVIII, tepatnya tahun 1746, semarang memperoleh status yang lebih signifikan dalam struktur administratif VOC. Kota ini dijadikan markas bagi seorang pejabat tinggi Belanda yang disebut *commandeur*. Pejabat ini diberi tanggung jawab untuk mengawasi wilayah pesisir utara dan timur pulau jawa. Wilayah yang berada di bawah kendalinya membentang cukup luas. Teritorinya dimulai dari Sungai Losari yang menjadi batas dengan Kesultanan Cirebon di sisi barat. Kemudian, wilayahnya terus memanjang ke arah timur hingga mencapai Surabaya dan kawasan yang dikenal sebagai *Oosthoek* atau Ujung Timur di bagian paling timur. Posisi strategis Semarang semakin diperkuat setelah Raad van Indie (Dewan Hindia) menyetujui proposal yang diajukan oleh Gustaaf Willem Baron van Imhoff. Mulai tanggal 20 Februari 1748, terjadi peningkatan status administratif untuk wilayah pantai utara-timur jawa, termasuk Sumenep. Daerah yang sebelumnya berada di bawah komando militer kini ditransformasi menjadi sebuah provinsi yang dikelola secara sipil. Provinsi yang baru terbentuk ini kemudian diorganisir menjadi sejumlah keresidenan. Keresidenan-keresidenan tersebut mencakup Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, dan Madura.

Johan Andries Baron von Hohendorff, yang sebelumnya menjabat sebagai *commandeur*, secara langsung diangkat ke posisi gubernur untuk memimpin provinsi baru ini (Yuliati et al., 2020). Masa jabatannya ditetapkan untuk periode lima tahun dengan kompensasi bulanan sebesar 200 florin. Perubahan struktur administratif ini merupakan langkah persiapan menjelang peralihan kedaulatan dan kepemilikan sepenuhnya atas wilayah Pantai Utara-Timur Jawa serta keseluruhan pulau madura. Teritorial ini akan segera diserahkan oleh Kerajaan Mataram kepada Kompeni Belanda (Yuliati et al., 2020). Rincian lengkap terkait perjanjian perpindahan Sumenep dibawah kekuasaan VOC dapat ditemukan pada karya De Jonge berjudul "*De Opkomst*" (1875). Tepatnya, informasi ini tercantum dalam Art. 4 dari dokumen tersebut. Dalam bagian ini, De Jonge merinci syarat-syarat dan kondisi yang menyebabkan Sumenep secara resmi beralih dari kekuasaan Mataram ke tangan VOC. Pasal ini menjadi bukti tertulis yang kuat dan rinci tentang peristiwa bersejarah ini, menjelaskan bagaimana dan mengapa Sumenep akhirnya jatuh ke genggaman kekuatan Kolonial Belanda.

Gelyk mede syn Hoogheyt by desen wettelyk afstaat en aan's Compagnies bescherminge overgeeft de landen van Sumanap en Pamakassan, gelegen aan 'toosteynde van 't eyland Madura, met alle derselver inwoonderen, in dier voegen gelyk deselve door den vorigen regent Tommagon Joedanagara aan d'Compagnie en den admiral Speelman ten tyde van de Sousouhounnang Tegal Wangy, en den oproer van Troenadjaja opgedragen zyn, en twelke ook by de volgende regenten dier landstrecke erkend en tot nog verbleven is, en by d'acte door den Commissaris Ram, uyt name van den Gouverneur-General ende de Raden van India jongst op den 9 April deses jaars ten behoeve van den overleden Regent Raden Aria Sjacranagara g' expedieert, nader is bevestigd (De Jonge, 1875). Terjemahannya adalah Madura dan Pamekasan yang terletak di Madura Timur beserta semua penduduk, hasil kekayaannya oleh bupatinya

Tumenggung Yudanegara telah diserahkan nasibnya kepada VOC melalui perwakilannya Speelman, setelah pemberontakan Trunajaya berhasil ditundukkan oleh Susuhunan Tegal Wangi.

Sumenep resmi terlepas dari Mataram dan menjadi wilayah dibawah kekuasaan VOC tanggal 5 Oktober 1705 yang telah tercantum pada perjanjian itu secara resmi. Perjalanan sumenep untuk mendapatkan status ini memakan waktu sekitar 88 tahun, berawal dari kalahnya Trunajaya hingga secara sah terlepas dari Mataram tahun 1705. Selama periode itu, Sumenep tidak tenang. Setelah wafatnya Tumenggung Yudanegara, perebutan kekuasaan antara keluarga keraton sangat kuat hingga menyebabkan pertikaian karena berbagai cara dilakukan untuk meraih kekuasaan tertinggi di Sumenep (Rahayu, 2016). Ketika sumenep berada dibawah kekuasaan VOC pada 1705, unsur-unsur asing mulai masuk ke dalam tata kota. Awalnya kota keraton (tradisional), sumenep berubah menjadi kota Hindia Lama yang memiliki istilah (*Oud Indische Stad*). Ciri-ciri ini terlihat dari struktur perkotaan, arsitektur bangunan, dan morfologi regional nya (Antonius et al., 2014). Setelah berada di bawah kekuasaan VOC, Sumenep mengalami nasib serupa dengan mataram, di mana kebebasan politiknya sangat dibatasi dan sumber dayanya dieksploitasi oleh VOC. Segala urusan pemerintahan yang melibatkan hubungan dengan daerah di luar Madura diawasi ketat, terutama jika dianggap tidak menguntungkan bagi kepentingan VOC. Meski demikian, satu keuntungan yang mungkin diperoleh Sumenep setelah menjadi wilayah taklukan VOC adalah pembebasan dari kewajiban membayar pajak kepada mataram. Adanya sebuah rencana terkait pembangunan benteng di daerah Kalianget bagian barat tahun 1705, Sumenep menjadi wilayah bernuansa kolonial. Tetapi, benteng itu tidak diteruskan pembangunannya karena posisi tempat benteng tersebut dinilai kurang efektif, maka dari itu istilah Loji Kantang oleh penduduk sekitar digunakan untuk menyebut tempat tersebut (Mahmudah, 2018).

Pembangunan pos dagang VOC di Kalianget pada tahun 1705 memunculkan ambisi perusahaan untuk menguasai wilayah tersebut, mengingat lokasinya yang sangat menguntungkan. Istilah Loji atau loge, yang juga dikenal sebagai *factory*, berasal dari kata Portugis *Factoria*. Kata ini merujuk pada bangunan multifungsi milik kelompok pedagang asing yang digunakan sebagai tempat tinggal, penyimpanan barang, dan kantor untuk menjalankan operasi perdagangan lintas laut. Bagi VOC, loji adalah bagian integral dari kekuasaannya, menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Keberadaan loji melambangkan dominasi VOC atas wilayah tersebut (Mahmudah, 2018). Sebelum kedatangan belanda, tidak ditemukan benteng pertahanan di sumenep. Pembangunan benteng baru dimulai setelah Sumenep menjadi vassal VOC pada 1705. Berkat lokasinya yang strategis di antara rute pelayaran jawa-maluku, Sumenep berkembang menjadi pelabuhan penting di ujung timur pulau madura. Di era tersebut, Desa Kertasada, yang terletak di muara sungai kali marengan, menjadi lokasi pelabuhan utama sumenep. Pelabuhan ini berperan penting sebagai tempat singgah kapal-kapal untuk memenuhi kembali kebutuhan logistik dan air bersih mereka (Ahmad, 2018). Kemudian pada 1785, Marengan terpilih menjadi lokasi dibangunnya benteng baru, masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Benteng Kalimo'ok. Lokasinya yang tinggi memudahkan pemantauan keamanan terhadap ancaman musuh. Posisi Benteng Kalimo'ok dipilih secara cermat karena alasan taktis. Lokasinya memungkinkan pengamatan yang efektif terhadap berbagai aktivitas yang berlangsung di perairan sebelah timur Sumenep (Yuda & Sulistiyo, 2022).

Bersamaan dengan pembangunan benteng, tempat tinggal orang Eropa tersebar di daerah marengan dan daerah pabean, dekat benteng Kalimo'ok. Arsitektur permukiman ini masih kuat dipengaruhi oleh kebudayaan *Indisch* yang mendominasi di Nusantara abad ke XVII dan XVIII (Zulkarnain et al., 2014). Ketentuan terkait dasar monopoli

garam yang dimiliki oleh VOC telah ditetapkan pada abad XVIII. Kongsi dagang yang dimiliki Belanda tersebut selalu memperhatikan proses pembuatan garam kemudian membeli seluruh hasil dari proses pembuatan garam itu. Sebagai salah satu industri terpenting di Jawa, produk garam menjadi komoditas yang sangat menguntungkan bagi VOC (De Jonge, 2011). Pemilikan Kolonial di Madura memiliki tiga aspek, Pertama yaitu, VOC menyadari adanya campur tangan pada permasalahan internal yang dimiliki oleh kerajaan untuk mempermudah perolehan hasil pembuatan. Kedua, mereka melihat Madura mempunyai kekuatan potensial yang bisa menyeimbangkan ketahanan Mataram. Ketiga, melalui pembuatan garam VOC merasa bahwa Madura merupakan wilayah penting untuk penyumbangan upeti (Parwoto & Padmo, 1997). Madura menjadi penghasil utama garam sangat dipengaruhi oleh harga garam yang di dalamnya terdapat ketentuan yang telah diterapkan oleh Belanda (Ricklefs, 2011). Dibandingkan dengan garam dari wilayah lain, garam yang diproduksi di Madura dikenal memiliki mutu yang sangat unggul, situasi ini mendorong jenderal spoor untuk mengerahkan banyak unit pasukan kembali ke pulau madura. Tujuannya adalah untuk melindungi dan mengamankan fasilitas produksi garam yang berada di wilayah tersebut (Putri & Hartanto, 2023).

Mufliha et al., (2021) menjelaskan bahwa keunggulan ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu kandungan tanah kapur di Madura dan iklimnya yang cenderung panas. Berkat kualitasnya yang superior, garam Madura kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Nusantara yang berada di bawah kekuasaan pemerintah belanda. Selama masa pemerintahan kolonial belanda, hak milik atas tanah sering berganti di madura, meskipun ketentuan adanya hak tradisional sedang dipertahankan mengikuti kepentingan yang diterapkan oleh belanda. Contohnya, Raffles pada masa Kolonial Inggris mengeluarkan kebijakan sistem sewa tanah dan Gubernur Jenderal Van Der Capellen pada masa Kolonial Belanda mendominasi dan menyingkirkan peranan tokoh penguasa lokal. Tujuan kebijakan berfungsi meminimalkan halangan terhadap dominasi Belanda di daerah yang dikuasainya. Prinsip *Domain Verklaring* berlandaskan sistem sewa tanah yang mengemukakan kepemilikan tanah semuanya jatuh ke tangan raja-raja yang berkuasa di daerah jawa, dikarenakan kewenangan Inggris/Belanda telah diakui oleh raja-raja di daerah jawa, kemudian pemilikan tanah saat ini menjadi kuasa belanda. Kebijakan tersebut adalah perubahan sistem birokrasi dari kerajaan tradisional berubah menjadi sistem birokrasi pemerintah Kolonial dimana Madura termasuk di dalamnya. Perubahan ini menandai transisi kekuasaan dari tangan lokal ke tangan Kolonial (Syafi'i, 2013).

3. Perdagangan VOC di Sumenep pada Abad XVIII

Pusat perdagangan yang ramai abad XVIII terletak di sumenep. Sebuah laporan menyebutkan bahwa Sumenep memiliki pasar tersibuk di madura. Sejak 1862, di keraton Sumenep tercatat 4.300 penjual dengan beragam latar belakang 130 Cina, 42 Melayu, 44 Arab, 4 Bengali, dan seorang india selatan. Selain itu, terdapat 8.000 kuli dan 3.000 buruh non-pertanian (Kuntowijoyo, 2002). Letak strategis sumenep menjadi faktor utama pesatnya perdagangan. Dermaga utama sebagai jalur perdagangan yang jauh dan memiliki tempat pemberhentian yang kemudian bisa untuk mengakses jalur perdagangan ke pulau-pulau lain, khususnya wilayah timur terletak di sumenep. Peran ini menarik perhatian dari kapal asing ataupun lokal untuk bersinggah di dermaga sumenep. Abad XVIII Sumenep tercatat sebagai kota persinggahan yang berarti terletak di pantai utara pulau jawa. Selama periode abad XVII hingga abad XVIII, wilayah pesisir utara pulau jawa berangsur-angsur beralih ke penguasaan VOC. Bersamaan dengan itu, perusahaan dagang Belanda ini juga berhasil mengambil alih kendali atas industri dan distribusi garam di wilayah tersebut (Rochwulaningsih, 2016). Seajar dengan kota-kota besar

seperti Bangkalan, Surabaya, Banyuwangi, Pasuruan, Gresik, Semarang, Jepara, Juana, Rembang, Pekalongan, Batavia, Cirebon, Tegal, dan Banten (Zulkarnain et al., 2014). Wilayah penghasil garam ini memiliki sebutan berbeda pada dua era penjajahan. Ketika VOC berkuasa, daerah tersebut dikenal dengan istilah *zoutnegorizen*. Kemudian, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, area yang sama disebut sebagai *zoutlanden* (Parwoto & Hartono, 2018).

Sumenep dikenal dengan pelabuhan kertasada yang sangat aktif, seperti yang dicatat oleh (Kuntowijoyo, 2002). Menurut Handinoto (2010) sebagaimana dikutip oleh Antonius (2014) menekankan bahwa ciri khas utama kota-kota yang berkembang sejak era kolonial adalah lokasinya yang dekat dengan laut atau sungai. Sumenep memenuhi kriteria ini, terletak di dekat pesisir dan memiliki dua sungai penting marengan dan saroka. Menurut Weber (1956), sebagaimana dikutip oleh Mahmudah (2018), kedua sungai ini berperan vital dalam memfasilitasi aktivitas perdagangan di sumenep. Pelabuhan di Sumenep menjadi magnet yang menarik minat para saudagar dari negeri seberang (Hidayat & Athoillah, 2024). Pelabuhan kertasada yang berada di kalianget merupakan salah satu fasilitas yang diandalkan di Kabupaten Sumenep sejak masa Kolonial (Sari, 2024). Catatan lalu lintas kapal di pelabuhan Sumenep menunjukkan peran pentingnya sebagai pusat perdagangan, menonjol dibandingkan bangkalan dan pamekasan yang kurang merasakan keuntungan dari aktivitas perdagangan. Sumenep berfungsi sebagai pelabuhan transit, yang berkorelasi dengan tingginya kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Fenomena ini sejalan dengan teori cooley, yang dikutip oleh Polak (1997) yang menyatakan bahwa daerah-daerah di mana jalur transportasi bersilangan cenderung mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Di lokasi-lokasi strategis seperti ini, arus barang dan manusia sering berhenti untuk melakukan pertukaran komoditas atau berganti moda transportasi. Aktivitas semacam ini menarik minat orang untuk menetap di area tersebut, dengan tujuan menyediakan layanan bagi para pedagang dan barang dagangan yang singgah. Mengingat kondisi demikian, pernyataan Van Goor (1996) yang menyebut Sumenep sebagai pusat perdagangan dan pelayaran di Madura menjadi sangat masuk akal.

Pulau Madura merupakan rute perniagaan kuno yang memiliki potensi di sistem perekonomiannya, pelabuhan yang dijadikan pusat perdagangan berada di selat madura. Komoditas ekspor berupa minyak nabati, arang, gula, garam, tembakau berada di daerah Parinduan abad XVIII yang merupakan dermaga utama, selain komoditas ekspor juga terdapat komoditas impor berupa padi, gula tebu, dan jagung. Salah satu orang Belanda menyampaikan informasi tentang adanya 1000 kapal yang memiliki bobot 20-200 ton yang menyebabkan adanya aktivitas dagang yang padat di dermaga Selat Madura (De Jonge, 1989). Ada tiga faktor dari dikuasainya Madura oleh VOC yang selanjutnya kebijakan faktor tersebut diteruskan oleh pihak pemerintah belanda. Faktor pertama, VOC merupakan kongsi dagang milik belanda yang memandang penting adanya campur tangan di dalam masalah inti kerajaan. Fungsinya yaitu untuk memonopoli dan mempermudah mendapatkan hasil produksi. Faktor kedua, madura oleh pihak belanda diyakini sebagai bentuk ketahanan untuk menyamai kekuatan yang dimiliki oleh mataram. Ketahanan yang dimiliki oleh madura dalam melawan mataram pada saat trunojoyo memimpin yaitu pangeran Kajoran (Mataram), Karaeng Kalesong (Sulawesi), dan Trunojoyo (Madura). Faktor ketiga, pembuatan garam di Madura menjadi sumber yang penting bagi VOC untuk memanasifasikan upeti (Parwoto & Padmo, 1997).

Adanya peraturan monopoli garam membuat kegiatan produksi garam yang memiliki nilai ekonomis menjadi salah satu potensi di Madura sebagai penghasil utama garam ke daerah di Nusantara yang berada dibawah kekuasaan belanda (Ricklefs, 2011). Penguasaan Mataram atas Madura tidak sepenuhnya diserahkan secara langsung kepada

VOC melainkan melalui suatu tahapan. Tahun 1705-1706 VOC menguasai daerah sumenep dan pamekasan. Para pemilik kekuasaan di Madura telah menandatangani kontrak dimana kesepakatan tersebut VOC menegaskan bahwa madura harus membayar upeti dan jika belanda membutuhkan pasukan, madura diminta untuk mempersiapkannya. VOC yang menguasai madura memiliki dasar pada perjanjian yang telah dilaksanakan pada tahun 1705 oleh Mataram dan VOC terkait dengan perdagangan di wilayah Malaka dan Maluku akan dilindungi jalur perdagangannya. Tepat pada tahun 1743 Sampang dan bangkalan resmi menjadi daerah kekuasaan VOC. Setelah dilakukan perjanjian penyebutan Madura hanya digunakan oleh kerajaan bagian barat tepatnya di bangkalan. Meski demikian, dominasi VOC terhadap daerah jajahannya dilaksanakan dengan cara tidak langsung. Adanya para penguasa madura masih diakui oleh VOC yaitu dengan cara pemberian upeti dan wajib militer (Zulkarnain et al., 2014). Dengan kata lain, penguasaan Madura oleh VOC dilakukan secara bertahap dan tidak sepenuhnya langsung, tetapi masih mengakui eksistensi penguasa lokal dengan memberikan upeti dan kewajiban tertentu.

Pelabuhan gresik, semarang, dan surabaya merupakan pusat dilakukannya jual beli garam pada abad XVIII, garam yang diperoleh berasal dari madura dan rembang. Kemudian setelah menerima kiriman garam maka garam tersebut akan dijual kembali ke wilayah kalimantan dan malaka. Total garam yang diperjualbelikan mencapai 12.480 (1 pikul=60 kg), yang memiliki rincian 30.340 di wilayah Kalimantan dan 96.085 di wilayah malaka. Batavia merupakan pusat pengekspor komoditas garam khususnya ke daerah sumatera, dengan perdagangan garamnya mencapai 7.000 pikul setiap tahun. Kebijakan tersebut sesuai dengan VOC dan pemerintah belanda menjalankan sistem monopoli produk garam. Keuntungan semakin besar ketika kebijakan ini melarang pedagang garam dari wilayah lain dilarang memasuki daerah sumatera, kecuali memasuki wilayah kalimantan (Knaap, 1999). Pada awalnya komoditas garam menjadi tanggung jawab urusan pemerintah, kemudian berubah menjadi usaha dari pemerintah. Di bawah kekuasaan VOC, kaliangnet bertransformasi menjadi pemukiman *modern*. Arsitektur khas Eropa dengan gaya *indische empire style* menghiasi kota ini, menciptakan pemandangan unik yang menarik perhatian. Sepanjang rute menuju pelabuhan kaliangnet, deretan bangunan peninggalan era kolonial masih berdiri kokoh. Saat ini, sebagian struktur tersebut dihuni oleh penduduk setempat, sementara sisanya terbengkalai dan kurang terpelihara. Daya tarik wisata kota tua kaliangnet terutama berpusat pada warisan arsitektur kolonial, fasilitas produksi garam, serta kawasan pelabuhannya (Yuda & Sulistiyo, 2022). Kaliangnet memiliki jalur kereta api yang menghubungkan langsung dengan Kamal yang telah dioperasikan oleh pemerintah kolonial. Disamping itu pelabuhan di Kaliangnet memiliki fungsi yaitu pusat berkumpulnya kapal untuk mengangkut hasil produksi garam yang akan berlayar ke wilayah nusantara (De Jonge, 2011). Aktivitas perdagangan internasional di pelabuhan-pelabuhan Jawa mencapai total 622.600 ton. Pelabuhan semarang berkontribusi sebesar 108.800 ton dari jumlah tersebut. Sementara itu, pelabuhan Batavia menduduki posisi teratas dengan menyumbang 255.000 ton. Pelabuhan-pelabuhan lainnya di jawa, termasuk Pekalongan, Pasuruan, Gresik, Cirebon, Tegal, Rembang, Banten, Sumenep, Bangkalan, Surabaya, dan Banyuwangi, memiliki volume perdagangan internasional yang bervariasi antara 2.200 sampai 38.800 ton (Yuliati et al., 2020).

Tabel 1. Volume Ekspor-Impor Barang di Sejumlah Pelabuhan di Jawa pada tahun 1775

Pelabuhan	Muatan	Pelabuhan	Muatan	Pelabuhan	Muatan
Banyuwangi	2.220 ton	Pasuruan	2.400 ton	Sumenep	13.600 ton
Bangkalan	7.200 ton	Surabaya	35.800 ton	Gresik	35.800 ton
Rembang	38.000 ton	Juwana	30.400 ton	Jepara	19.000 ton
Semarang	108.800 ton	Pekalongan	19.200 ton	Tegal	14.400 ton
Cirebon	20.800 ton	Batavia	>254.800 ton	Banten	19.400 ton

(Sumber: Knaap, 1999)

Secara administratif, di wilayah kecamatan pragaan terdapat desa yang memiliki nama preduan terletak di barat daya dari kabupaten sumenep dengan luas wilayah 4,5 km. Preduan yang sudah ada sejak zaman kekuasaan Mataram pada abad XVII ini memiliki letak yang strategis, sehingga sudah berabad-abad menjadi tempat perdagangan yang cukup penting. Preduan juga merupakan tempat penting di antara ibu kota sumenep dan pamekasan. Dalam sebuah sumber eropa, daesa preduan disebut sebagai bandar dalam kesepakatan pertama yang telah disepakati tahun 1746 oleh VOC dengan Sumenep (De Jonge, 1989). Produk utama yang diekspor adalah kacang, tembakau, bawang merah, minyak kelapa, dan gula siwalan. Masyarakat preduan mayoritas memiliki pekerjaan sebagai nelayan yang menjadi sumber pendapatan utama bagi seluruh masyarakatnya (De Jonge, 1989). Pasca dibubarkannya VOC di tahun 1799, wilayah pulau madura, termasuk sumenep, beralih menjadi bagian dari kekuasaan hindia belanda. Pemerintah kolonial di batavia memutuskan untuk melanjutkan sistem pemerintahan tidak langsung di kawasan tersebut. Meskipun demikian, para bupati di madura, termasuk sumenep, masih memiliki otonomi dalam mengelola pemerintahan di daerah kekuasaan mereka masing-masing. Selain itu, praktik politik kontrak yang sebelumnya diterapkan oleh VOC tetap dipertahankan (De Jonge, 2011).

Kesimpulan

Perlawanan militer Sultan Agung terhadap Madura pada 1624 menimbulkan perubahan dalam kehidupan di pulau tersebut. Hampir seluruh penguasa Madura gugur, yang selamat hanya Raden Prasena dengan gelar Cakraningrat I serta Sampang menjadi pusat kekuasaan atas seluruh madura. Penguasaan atas Madura pada awalnya diwakili oleh Cakraningrat I yang menetap di mataram. Proses pelepasan Sumenep dari dominasi Mataram merupakan proses rumit dan memakan waktu lama. Harapan para pemimpin Sumenep untuk melepaskan diri dari dominasi Mataram membawa sumenep menjadi sebagai daerah yang dijajah VOC. Dengan armada militer yang kuat, penguasa Sumenep beranggapan bergabung dengan VOC akan lebih baik. VOC memanfaatkan celah pergolakan internal Mataram dalam memperebutkan tahta antara Amangkurat III dan Pangeran Puger. VOC memaksa Mataram menandatangani perjanjian pelepasan wilayah, termasuk pamekasan dan sumenep, dengan alasan ketidak mampuan membayar upah ganti rugi selama perang melawan para pemberontak. Sumenep menjadi daerah kekuasaan VOC tepat pada tanggal 5 Oktober 1705. Kemudian, sumenep wajib menjalankan seluruh peraturan VOC, memberi upeti, membayar pajak kontingen, dan menyuruh rakyatnya menjadi anggota militer jika dibutuhkan VOC. Bergabungnya sumenep dijadikan alat VOC sebagai daya tarik bagi wilayah lain agar juga bergabung bersama VOC. Bergabungnya sumenep tentu memberi dampak positif berupa peningkatan perekonomian setelah 1705, namun juga dampak negatif berupa beban pajak besar yang merugikan masyarakat bawah. Sumenep juga melangsungkan upaya kolaborasi dengan VOC secara tidak langsung untuk memperluas daerah kekuasaan VOC di Nusantara.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Z. (2018). *Babad Modern Sumenep*. Yogyakarta: Araska.
- Antonius, A. R. D. I. Y. A. N. T. O., Achmad, D. J. U. N. A. E. D. I., Suryabrata, I. K. A. P. U. T. R. A., & Adi, D. J. A. D. M. I. K. A. (2014). The concept of modern dutch colonial architecture to the development of javanese architecture. *Dimensi (Journal of Architecture and Built Environment)*, 41(1), 37-42.
- Atikurrahman, M. (2008). *Pergeseran Bentuk dan Makna Dalam Pengindonesiaan Nama-nama Tempat Berbahasa Madura di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep Madura* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- De Jonge, H. (1875). *De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie*. Amsterdam: Gravenhage.
- De Jonge, H. (1989). *Madura dalam Empat Zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- De Jonge, H. (2011). *Garam, Kekerasan Dan Aduan Sapi: Essai-essai Tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura*. Yogyakarta: PT. LKiS.
- Hernawan, W. (2016). Menelusuri Para Raja Madura Dari Masa Pra-Islam Hingga Masa Kolonial. *Wawasan J. Ilm. Agama dan Sos. Budaya*, 1(2), 239-252.
- Hidayat, R., & Athoillah, A. (2024). Hunting For Solomon's Ring in Salt Island: The History of Hadrami Diaspora in Sumenep, 1832-1901. *Satmata: Journal of Historical Education Studies*, 2(1), 1-16.
- Kasdi, A. (2003). *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa*. Yogyakarta: Jendela.
- Knaap, G. (1999). Shipping And Trade in Java, c. 1775: A Quantitative Analysis. *Modern Asian Studies*, 33(2), 405-420.
- Kuntowijoyo. (2002). *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850- 1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Mahmudah, I. N. A. Y. A. T. U. L. (2018). Perkembangan Kota Sumenep Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1883-1926. *Avatar e-journal Pendidikan Sejarah*, 6(4).
- Mufliha, D. I., Khasanah, A. N., Siddiqy, H. A., Lutfi, A., & Susanto, D. (2021). Perlawanan Petani Garam Madura Terhadap Monopoli Dagang Kolonial Belanda: Tinjauan Historis. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 3(2), 161-170.
- Parwata, S. K., & Padmo, S. (1997). Monopoli Garam Di Madura 1905-1920 The Monopoly of Salt in Madura. *Berkala Penelitian Pasca Sarjana*, 10(1997).
- Parwoto, P., & Hartono, M. (2018). Dampak Monopoli Garam di Madura Pada Abad XX. *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 33-42.
- Polak, J. B. A. F. M. (1997). *Sosiologi Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Putri, L. A., & Hartanto, E. C. S. (2023). Kajian Historisme dalam Cerpen “Yasima Ingin Jadi Juru Masak Nippon” karya Edy Firmansyah: Analysis of Historicism in Short Story “Yasima Ingin Jadi Juru Masak Nippon” by Edy Firmansyah. *Kibas Cenderawasih*, 20(2), 185-194.
- Rahayu, I. (2016). Pergeseran Kesultanan Sumenep ke Tangan VOC Tahun 1624-1705. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3).
- Ricklefs, M. C. (2011). *Sejarah Indonesia Modern* (D. Hardjowidjono, Ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rochwulaningsih, Y. (2016). Senjata Kaum Lemah: Perlawanan Sehari-Hari Petambak Garam. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 1(2), 121-132.
- Romli, M. (2023). Kuasa dan Moral Pangeran Trunojoyo Madura. *Journal Transformation of Mandalika*, 4(5), 188-206.

- Santoso, R. G. (2016). Kebijakan Politik dan Sosial-Ekonomi di Kerajaan Mataram Islam pada Masa Pemerintahan Amangkurat I (1646-1677). *Risalah*, 1(2).
- Sari, S. N. F. R. (2024, January). Kualitas Pelayanan Pegawai Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Kalianget Di Kabupaten Sumenep. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 1, No. 1, pp. 712-722).
- Syafi'i, I. (2013). Persaingan Pengangkutan Garam Di Selat Madura 1924-1957. *Citra Lekha*, 17(1), 85-104.
- Werdisastra, R. (1996). *Babad Sumenep*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah.
- Widyanti, R. H. D., & Setiyonugroho, P. (2022). Dynamics Of the Salt Industry in Madura 1950-1975. *Karmawibangga: Historical Studies Journal*, 4(2), 113-124.
- Yuda, M. R., & Sulistiyo, W. D. (2022). Analisis Spasial Unsur Pariwisata Sejarah Budaya di Kabupaten Sumenep untuk Pembangunan Pariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah. *Jurnal Master Pariwisata (Jumpa)*, 520.
- Yuliati, D., Susilowati, E., & Suliyati, T. (2020). *Riwayat Kota Lama Semarang dan Keunggulannya sebagai Warisan Dunia*. Semarang: Sinar Hidoep.
- Zulkarnain, I., Imron, D. Z., Agil, R. B. A. R., Mukkaram, R. B. A., Setiawan, E., Hajar, I., Raharja, H., Kafie, J. & Arifien R, T. (2014). *Sejarah Sumenep*. Sumenep: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep.